

**ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PILKADA LOMBOK TENGAH DI
KELURAHAN LENENG KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Oleh :

Muh. Haerul Husni
NIM: 170603009

**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2022**

**ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PILKADA LOMBOK TENGAH DI
KELURAHAN LENENG KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar (S.Sos)**



Oleh :

Muh. Haerul Husni
NIM: 170603009

**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2022**

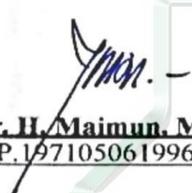
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

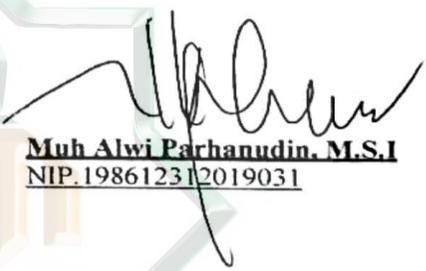
Skripsi oleh: Muh Haerul Husni, NIM: 170603009 dengan judul “Analisis Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Lombok Tengah | Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: _____

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Maimun, M.Pd
NIP.197105061996031001


Muh Alwi Parchanudin, M.S.I
NIP.198612312019031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

**Hal: Ujian Skripsi
Yang Terhormat**

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Di
Mataram**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

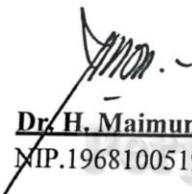
Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara/i:

Nama : Muh Haerul Husni
NIM : 170603009
Prodi : Pemikiran Poitik Islam
Judul : Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Dalam Pilkada
Lombok Tengah Di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah

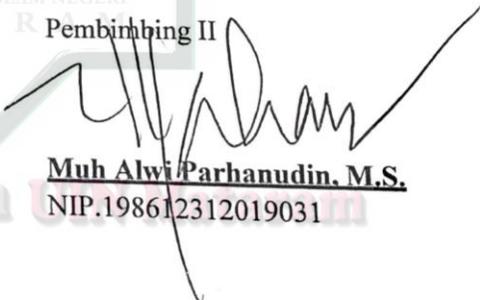
telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyah*-kan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Maimun, M.Pd
NIP.19681005199803102

Pembimbing II


Muh Alwi Parhanudin, M.S.
NIP.198612312019031

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **MUH. HAERUL HUSNI**, NIM: 170603009 dengan judul "Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam pilkada Lombok Tengah Di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah," telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal 06 Juni 2022.

DEWAN PENGUJI

Dr. H. Maimun, M.Pd
(ketua Sidang/Pemb. I)

Muh Alwi Parhanudin, M.S.I
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Zakaria Ansori, M.Hum
(Penguji I)

Purnami Safitri, MA
(Penguji II)

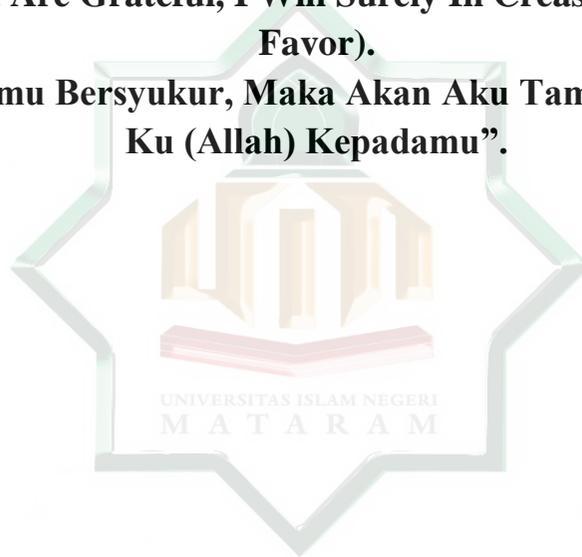
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd
NIP. 196602151997031001

MOTTO

If You Are Grateful, I Will Surely Increase You (In Favor).

“Jika Kamu Bersyukur, Maka Akan Aku Tambah Nikmat Ku (Allah) Kepadamu”.



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

1. Bapak tercinta “Sanusi” yang senantiasa sabar dalam mendidik serta mendoakan anaknya sehingga tetesan keringatnya tidak pernah lelah memperjuangkan anak-anaknya terutama dalam menuntut ilmu.
2. Ibu tersayang “Mahyuni” yang senantiasa sabar dalam mendidik serta mendoakan anak-anaknya.
3. Adik tersayang “Muh. Zofran Aziz” yang menjadi tempat berkeluh kesah dan tempat berbagi satu sama lain sehingga saya memahami artinya kebersamaan.
4. Sahabat-sahabat pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) tempat saya berproses untuk menuntut ilmu sehingga saya bisa sampai di titik ini.
5. Teman-teman kelas angkatan pertama (2017) jurusan pemikiran politik islam fakultas ushuluddin dan studi agama universitas islam negeri (UIN) Mataram.
6. Teman-teman penghuni kos lumba-lumba tempat saling berbagi dan telah menjadi rumah kedua saya.
7. Almamater dan kampus UIN Mataram.

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu.

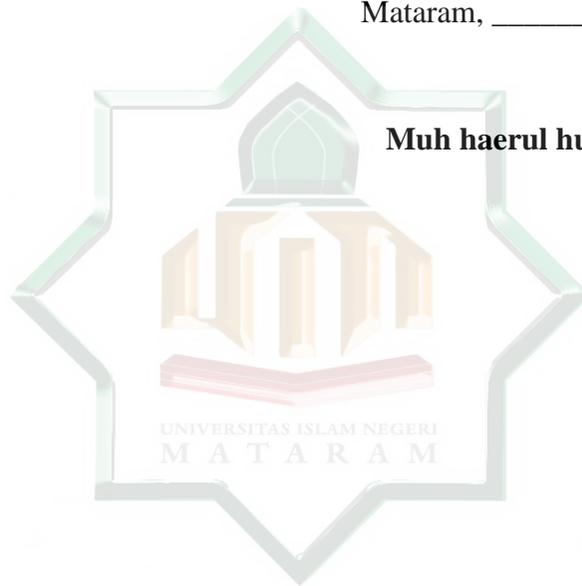
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Maimun, M.Pd sebagai Pembimbing I dan Bapak Muh. Alwi Parhanudin, M.S.I sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan motivasi serta koreksinya tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam penulisan ini.
2. Zakaria Ansori, M.Hum dan Purnami Safitri, MA sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini;
3. Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam dan Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam.
4. Dr. H. Lukman Hakim M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
5. Bapak Prof. H. Masnun Tahir selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat kesalahan serta kekeliruan baik dalam penulisan maupun dalam penyusunan, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyusunan karya ilmiah lainnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, serta tercatat sebagai amal ibadah sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal'alam.

Mataram, _____

Muh haerul husni



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	22
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Dalam Pilkada Lombok Tengah di Kelurahan Leneng.....	34
C. Faktor yang mendukung dan menghambat Partisipasi politik masyarakat Disabilitas dalam pilkada Lombok Tengah di Kelurahan Leneng	40
BAB III PEMBAHASAN	
A. Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Dalam Pilkada Lombok Tengah di Kelurahan Leneng	45
B. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Dalam Pilkada Lombok Tengah Di Kelurahan Leneng	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PILKADA LOMBOK TENGAH DI
KELURAHAN LENENG KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Oleh:

Muh Haerul Husni

NIM: 170603009

ABSTRAK

Partisipasi politik merupakan suatu bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat dan merupakan sesuatu yang fundamental dalam melakukan proses tahapan demokrasi. Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2020 di kabupaten Lombok tengah telah usai di gelar, segala bentuk proses dan dinamika politik telah dilalui bersama dan tidak terlepas dalam proses partisipasi politik bagi semua masyarakat Lombok tengah pada umumnya tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas.

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk melihat bagaimana bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat masyarakat disabilitas dalam tahapan partisipasi politik yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan pengumpulan data utama diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan data.

Hasil penelitian menemukan bahwa partisipasi politik pemilih difabel di Kelurahan Leneng berdasarkan kesadaran politiknya mereka termasuk ke dalam kesadaran yang otonom yang artinya partisipasi masyarakat yang dilakukan secara spontan atas keinginan sendirinya. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa faktor yaitu pertama, pemilih difabel masih kurang mendapatkan sosialisasi dari pihak penyelenggara. Kedua, pemilih difabel juga masih kurang dilibatkan dalam proses tahapan pemilihan sehingga mereka berpartisipasi hanya pada saat pemberian hak suara saja. Ketiga, pemilih difabel merasa calon yang tersedia dirasa tidak merepresentasikan kepentingan mereka.

Kata Kunci: partisipasi politik, penyandang disabilitas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa terlihatnya wajah demokrasi di Indonesia. Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi yang ada. Langkah ini begitu penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena di dalamnya ada hak-hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya yakni proses melakukan pemilihan kepala negara sampai tingkat desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat. System ini menjadi acuan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses tersebut.

Partisipasi politik adalah suatu bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat merupakan sesuatu yang fundamental dalam melakukan proses demokrasi. juga mempunyai fungsi dan makna yang begitu penting dalam kegiatan demokrasi.. proses pembangunan politik yang baik karena dilahirkan dari proses demokrasi dari masyarakat juga baik, hal tersebut begitu berarti bagi pembangunan bangsa dan Negara. Disamping itu, partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan bahkan tidak akan ada artinya sama sekali jika tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum baik itu pemilihan presiden hingga pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting untuk ditilik. Rendah atau tingginya partisipasi masyarakat merupakan sinyal dan indicator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.¹

Dalam pemilihan umum, minimnya partisipasi adalah suatu proses yang kurang efektif dalam menghasilkan pemimpin. Akan tetapi, disisi lain apa yang dihasilkan dalam pemilihan umum hanya akan melahirkan bentuk kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kekecewaan tersebut akhirnya akan menimbulkan

¹ Oli, Rina Rahman. “*pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dikelurahan Tatura utara Kecamatan Palu selatan pada pilkada kota palu tahun 2015*”. EDU CIVIC 6.01 (2018).

berbagai macam reaksi, salah satunya yakni golput. Golput merupakan kelompok yang tidak mau menggunakan hak suaranya.

Tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat adalah suatu acuan yang menjadi tolak ukur keberlangsungan demokrasi disuatu Negara. Logika yang digunakan adalah semakin tinggi intensitas partisipasi politik warga di sebuah negara maka dikatakan demokratis negara tersebut. Di lain sisi partisipasi politik diartikan sebagai upaya-upaya dalam mendukung kandidat atau memenangkan kontestasi dalam pemilu.² Partisipasi politik adalah aspek yang begitu penting untuk sebuah tatanan negara demokrasi. Sebagian besar warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana lebih cenderung kurang diperhitungkan dalam proses politik.³ Terlebih lagi pada kaum penyandang disabilitas dengan keadaan mereka yang minoritas seringkali diabaikan. Pemilihan Bupati dan wakil bupati sebagai hajat besar bangsa idealnya dapat dinikmati dan diikuti oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Menurut Ramlan Surbakti Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam proses penentuan segala keputusan yang menyangkut segala hal yang akan mempengaruhi hidupnya.⁴ Tolak ukur partisipasi masyarakat tidak hanya di nilai dari seberapa banyak intensitas kehadiran masyarakat dalam memberikan hak pilihnya, di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, akan tetapi sejauh mana keterlibatan pemilih dalam setiap tahapan dalam pemilu.⁵ Disabilitas adalah kelompok masyarakat yang begitu beragam, penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas mental, disabilitas fisik ataupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah dari penyandang disabilitas cukup beragam, kementerian sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat. Kementerian pendidikan nasional menyebutkan dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan kementerian kesehatan

² Dirga Ardina, dkk, transaksi politik warga (Depok: Cakra Wikara Indonesia, 2018), 4.

³ Sudijono Sastroatmodjo, Prilaku Politik (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995).

⁴ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2003).

⁵ KPU, pedoman pelaksanaan (relawan demokrasi) relasi pemilu tahun 2019.

menyebut sebagai penderita cacat.⁶ Beberapa Jenis kecacatan dapat di kelompokkan menjadi cacat fisik (tuna rungu, tuna netra, dan tuna daksa) cacat mental dan cacat fisik dan mental.

Suatu bentuk diskriminasi dalam suatu kelompok adalah bentuk cacat dalam demokrasi. salah satunya adalah penyandang disabilitas yang belum mampu memberikan hak suaranya dalam proses politik. Penerapan sederhana dari nilai demokrasi adalah pemerataan sarana dan prasarana bagi semua warga Negara yang harus sama kedudukannya. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat non disabilitas tanpa adanya deskriminatif.⁷ Pada pasal 28 1 ayat (2) berbunyi “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”. Maka dari itu dalam proses pembangunan nasional diperlukan untuk melibatkan semua kalangan terlebih lagi penyandang disabilitas dan diberikan perhatian khusus, karena tidak menutup kemungkinan nantinya penyandang disabilitas dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, sepanjang ada keinginan yang kuat dan ditunjang dengan sara pra sarana yang memadai.

Menurut Andre M. Fikri rendahnya partisipasi disabilitas terdapat dalam dua faktor yaitu internal dan eksternal. Untuk faktor internal berasal dari para disabilitas, karna lingkungan system dan penyelenggaraan sedangkan faktor eksternal merupakan KPU Kabupaten Lombok Tengah, dilainsisi kurangnya perhatian penyelenggara terhadap pemilih penyandang Disabilitas dan kurang tepatnya metode sosialisasi.⁸ Namun dalam UU 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan, intelektual, fisik, , mental, dan sensorik untuk jangka waktu lama. Dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal.

⁶ Vulnerable Groups Eko Riyadi, *Kajian Dan Mekanisme Perlindungan* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012).

⁷ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2008).

⁸ Andre M. Fikri, “Partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada) kota Payakumbuh tahun 2017,” *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 1, no. 1 (2019): 44–65. 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas : Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai hak asasi manusia dan kedudukan hukum yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan masyarakat Indonesia adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk kehidupan yang berkembang dan maju secara adil dan bermartabat.

Pemberian jaminan partisipasi di ruang lingkup disabilitas sifatnya masih spasial dan hanya sebatas pengaturan instrument pelaksana teknis, seperti Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten /Kota; serta Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam bentuk cacat demokrasi ini, setidaknya Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas dan sejauh ini parlemen sedang membahas sebuah Rancangan Undang – Undang Tentang Disabilitas. Meskipun peraturan tersebut dilaksanakan KPU dalam menjamin penyandang disabilitas dapat memberikan hak suaranya pada pemilu, akan tetapi pada kenyataannya hak politik mereka dinilai masih banyak disepelekan. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran mengenai sebuah sistem, mekanisme maupun tahapan dalam pemilu berakibat pada hak suara penyandang disabilitas rentan termanipulasi.⁹

Penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai keterbatasan intelektual, mental, fisik dan sensorik dalam jangka waktu lama yang pada proses interaksi dengan lingkungan dan sikap dalam hal ini masyarakat dapat menemukan berbagai macam hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif

⁹ Ibid hlm. 8

berdasarkan asas kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).¹⁰

Sedangkan istilah dalam disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *Different Ability* yang berarti manusia mempunyai kemampuan yang berbeda.

1. Jenis-jenis penyandang disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas dalam hal ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu::

a. Cacat Fisik

Cacat fisik merupakan kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada sebagian fungsi tubuh, seperti gerak tubuh, pendengaran, penglihatan, kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain:

a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat rungu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j).

b. Cacat Mental

Cacat mental merupakan kelainan mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan dan ataupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.

c. Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental

Merupakan keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila dalam hal ini yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

Menurut Reefani (2013:17), penyandang disabilitas dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

2. Disabilitas Mental

Disabilitas mental terdiri dari:

- a. **Mental Tinggi.** dikenal dengan orang berbakat intelektual, selain memiliki tingkat kemampuan intelektual di atas rata-rata

¹⁰ Ibid. hlm 8.

dia juga mempunyai kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

- b. **Mental Rendah.** Kemampuan mental rendah atau sering disebut kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Dilain sisi anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c. **Kesulitan Belajar Spesifik.** kesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.
3. Disabilitas Fisik

Disabilitas Fisik atau sering disebut kelainan fisik terdiri dari:

- a. **Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).** Tuna daksa merupakan individu yang mempunyai masalah dalam gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau diakibatkan oleh kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b. **Kelainan Dalam Indera Penglihatan (Tuna Netra).** Tunanetra merupakan orang yang mempunyai hambatan dalam melihat. Tunanetra bisa diklasifikasikan dalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
- c. **Kelainan Pendengaran (Tunarungu).** **Tunarungu merupakan orang yang** mempunyai hambatan dalam pendengaran baik yang berupa permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga kebanyakan dari mereka biasa disebut tunawicara.
- d. **Kelainan Bicara (Tunawicara).** Tunawicara merupakan seseorang yang mengalami kesulitan dalam proses mengungkapkan pikiran dalam bahasa verbal, mendapatkan kesulitan atau bahkan tidak bisa dimengerti oleh kebanyakan orang. Kelainan dalam hal bicara ini bisa dimengerti oleh orang lain. Kelainan dalam hal berbicara ini bisa bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan oleh ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan oleh adanya

ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang mempunyai keterkaitan dengan bicara.

4. Tunaganda (disabilitas ganda)

Tunaganda atau lebih sering disebut penderita cacat lebih dari satu bentuk kecacatan (cacat fisik dan mental) adalah mereka yang mempunyai lebih dari satu jenis keluarbiasaan, contohnya penyandang tuna netra dan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

Jenis-Jenis Disabilitas

Golongan 1 : tuna daksa atau kelainan fisik baik bawahan lahir atau kecelakaan

Golongan 2 : tuna netra, gangguan dalam penglihatan

Golongan 3 : tuna rungu wicara, tidak bisa bicara dan mendengar

Golongan 4 : tuna grahita atau cacat mental

Golongan 5 : dan lain-lain

Sumber : KPU Republik Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis jadikan sebagai batasan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Partisipasi politik masyarakat Disabilitas dalam Pilkada Lombok tengah di Kelurahan Leneng ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Partisipasi politik masyarakat Disabilitas dalam pilkada Lombok Tengah di Kelurahan Leneng ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik masyarakat disabilitas dalam Pilkada Lombok Tengah di Kelurahan Leneng.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik masyarakat Disabilitas dalam Pilkada Lombok Tengah di Kelurahan Leneng.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

- 1) Dapat memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu politik. Partisipasi masyarakat, pilkada Lombok tengah. Serta dapat memberikan sumbangsih bagi bidang ilmu politik dan sosial.
 - 2) Sebagai tambahan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang belum terungkap.
- b. Manfaat praktis
- 1) Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi lembaga kampus UIN Mataram khususnya fakultas ushuluddin dan studi agama prodi pemikiran politik islam.
 - 2) Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi KPU Lombok tengah dan juga para politisi yang ada.
 - 3) Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam konteks analisis partisipasi politik pilkada di Lombok tengah kelurahan leneng.

D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar nantinya penelitian ini bisa terarah dengan baik, maka dalam melakukan penelitian ini peneliti cukup membatasi ruang lingkup dalam Penelitian ini, dan hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan fokus masalah yang ditemukan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu, partisipasi politik masyarakat disabilitas dalam pilkada Lombok tengah di kelurahan leneng.

2. Setting Penelitian

Tempat Penelitian ini adalah di kelurahan leneng kecamatan praya kabupaten lombok tengah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini tidak mungkin terlepas dari hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk digunakan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain terletak pada subjek penelitiannya, sasarannya, serta focus penelitiannya. Penelitian terdahulu yang relevan dengan Penelitian yang dilakukan saat ini

oleh peneliti dengan judul “Analisis Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Lombok Tengah di kelurahan Leneng kecamatan praya kabupaten lombok tengah”. Ada beberapa hasil Penelitian sebelumnya terkait dengan Penelitian ini, selengkapnya bias dilihat dalam uraian di bawah ini:

1. Maria Desti Rita, ”Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam melakukan sosialisasi politik Pemilihan umum kepala daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung pada tahun 2016”¹¹

Persamaan dan perbedaan antara Penelitian yang dilakukan oleh Maria Desti Rita dengan peneliti di Dalam skripsi tersebut, yang menjadi titik fokus pembahasan merupakan mengenai sosialisasi politik KPU terhadap penyandang disabilitas disertai upaya-upaya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi para penyandang disabilitas, akan tetapi penelitian tersebut mempunyai titik fokus dan subyek yang cukup berbeda dengan penelitian. Relevansi yang dapat dilihat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis merupakan sama-sama membahas mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas.

2. Nabela Pusparani, “Perlindungan hukum Terhadap Hak politik penyandang Disabilitas di Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011”¹²

Dalam penelitian ini selain membahas tentang hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, penulis juga dalam hal ini menitik beratkan permasalahan pada perlindungan hukum terhadap hak politik penyandang disabilitas dan membatasi titik fokus lokasi penelitian di Wilayah Kota Pekanbaru

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan sama-sama membahas mengenai sejauh mana tahapan penjaminan dan pemenuhan dalam hak-hak politik penyandang disabilitas.

¹¹ Maria Desti Rita, ”Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam sosialisasi politik Pemilihan umum kepala daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung pada tahun 2016”

¹² Nabela Pusparani, “Perlindungan hukum Terhadap Hak politik penyandang Disabilitas di Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011”

3. Sarah Sausan H., ‘‘Pemenuhan Hak-hak Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kota Medan’’.¹³

Secara umum permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian tersebut mengarah pada pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Akan tetapi, secara signifikan yang dapat membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam studi kasus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dalam hal ini hanya membatasi masalah pada penyandang disabilitas tunanetra.

Relevansi yang bisa dilihat dari penelitian ini dengan penelitian penulis merupakan sama-sama membahas mengenai bagaimana bentuk penjaminan dan pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas.

4. Junaidi Abdillah, ‘‘Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda, pada tahun 2015’’.¹⁴

Yang dalam hal ini menjabarkan bagaimana bentuk strategi KPU Samarinda dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota pada tahun 2015, namun di dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang dalam hal ini lebih fokus pada penyandang disabilitas. Penelitian ini lebih memaparkan partisipasi pemilih secara umum.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan sama-sama membahas tentang bagaimana partisipasi pemilih disabilitas dan hambatan pemilih disabilitas.

¹³ Sarah Sausan H., ‘‘Pemenuhan Hak-hak Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kota Medan’’ 2013 Sumatera Utara

¹⁴ Junaidi Abdillah, ‘‘Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda, pada tahun 2015’’.¹⁴

F. Kerangka Teori

1. Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan proses dalam hal penentuan sikap dan sejauh mana keterlibatan hasrat yang dimiliki oleh setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, dan pada akhirnya akan mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan, serta ikut dalam tahapan dan proses dalam mengambil bagian dari setiap pertanggungjawaban bersama.¹⁵

Definisi secara umum bisa dikatakan bahwa partisipasi politik merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk ikut terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan atau lobby dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menghadiri rapat umum dan menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan aksi langsung dan sebagainya.¹⁶

Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya *memahami ilmu politik* : “Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah. Ramlan Surbakti memberi contoh bahwa partisipasi politik antara lain kegiatan mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijaksanaan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu,

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 2008), Hlm. 367.

¹⁶ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: SIC, 1998), Hlm. 128.

mengajukan alternatif, pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilu”.¹⁷

Pada abad 14, hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan orang terpandang.¹⁸ Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa renaissance dan reformasi abad ke 15 sampai abad 17, abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang professional, buruh kota, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara.¹⁹.

a. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Gabriel Almond secara garis besar membagi partisipasi politik kedalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Bentuk konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan legal misalnya dalam proses pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan ikut serta bergabung dalam kelompok kepentingan/ partai politik dan komunikasi individual dengan para pejabat politik/ administratif.

Partisipasi non konvensional merupakan suatu bentuk tindakan yang mungkin legal seperti pengajuan Petisi, dan bentuk illegal seperti kegiatan demonstrasi, konfrontasi, mogok, serta segala bentuk tindakan dalam kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) dan

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1992), Hlm. 118

¹⁸ Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 45

tindakan kekerasan terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi.²⁰

Bentuk partisipasi politik konvensional yang lebih aktif antara lain merupakan bisa ikut serta ambil bagian dalam segala proses kegiatan kampanye, bergabung dengan tim sukses, dan menyumbang dana, karena bentuk partisipasi politik ini lebih berperan aktif dalam memperjuangkan segala keinginan atau tuntutan. Kemudian bisa ikut berkompetisi dengan menjadi kandidat, karena kandidat harus bisa berusaha lebih aktif dalam proses kegiatan pencalonan dan kampanye, kandidat calon harus terjun langsung dalam proses kegiatan kampanye untuk bisa mempengaruhi orang lain agar nantinya dapat memberikan dukungan.

Dalam artian non-konvensional, partisipasi politik mencakup segala bentuk kegiatan yang lebih cenderung melibatkan banyak orang dalam suatu bentuk kelompok massa dan kadang dapat disertai dengan segala macam bentuk pelanggaran tertib hukum dan kekerasan. Partisipasi politik non-konvensional juga bisa diterima oleh masyarakat luas apabila tidak disertai dengan aksi pengerusakan dan juga kekerasan, misalnya dalam aksi protes dengan cara berpawai dengan cara membawa spanduk dan poster yang berisi tentang berbagai tuntutan.

Partisipasi politik sendiri bisa terwujud dalam berbagai bentuk. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagikan bentuk partisipasi politik kedalam beberapa golongan yaitu:²¹

1. Proses dalam hal pemberian suara guna memilih pemimpin, kegiatan dalam memberikan sumbangan

²⁰ Mas'ood, Mohtar, dan Mac Andrew Colin, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2011) Hlm. 57-58.

²¹ Samuel P. Huntington & Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), Hlm. 16

untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan serta mencari dukungan bagi seorang calon, dan setiap tindakan yang bertujuan guna mempengaruhi hasil pemilihan.

2. Lobbying yang pada dasarnya mencakup upaya-upaya perorangan dan kelompok guna menghubungi pejabat-pejabat dalam pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan – keputusan yang akan di ambil.
3. Kegiatan dalam organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi (*contacting*) adalah bentuk tindakan seseorang yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan bertujuan memperoleh manfaat bagi segelintir orang.
5. Tindakan Kekerasan (*violence*) merupakan bentuk tindakan individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi segala keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik, revolusi dan pemberontakan.

Berdasarkan pendapat para ahli bisa disimpulkan bahwasanya partisipasi merupakan segala bentuk kegiatan dan keikutsertaan kelompok masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat untuk mempengaruhi segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar nantinya terjadi suatu perubahan kearah yang lebih baik.

b. Faktor-faktor partisipasi politik

Milbrath yang menyebutkan ada dua faktor utama yang bisa mendorong seseorang untuk berpartisipasi politik, yakni adanya faktor pendukung dan penghambat yang dimana didalam faktor itu terdapat lima unsur diantaranya:²²

²² Efriza, op. cit., h. 534

1. Perangsang politik, dapat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan atau diskusi politik, media massa, diskusi-diskusi formal dan informal yang pemilih dapatkan/lakukan.
2. Karakteristik pribadi seseorang merupakan watak sosial dari seorang pemilih yang pada dasarnya memiliki kepedulian sosial yang cukup besar terhadap segala bentuk masalah sosial, politik, ekonomi, dan hankam, yang biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.
3. Karakteristik sosial merupakan status social, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama pemilih yang bisa mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku pemilih.
4. Situasi atau lingkungan politik merupakan keadaan sosial dari lingkungan sekitar pemilih yang baik dan kondusif guna mau dengan senang hati berpartisipasi.
5. Pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk merubah persepsi warga Negara agar dapat memiliki kesadaran dalam politik dengan terlibat dalam aktivitas politik.

faktor penghambat partisipasi politik merupakan faktor yang bisa membuat seorang pemilih tidak mau untuk berpartisipasi dalam segala bentuk aktivitas politik. Faktor penghambat ini ada 4 yaitu:

1. Kebijakan induk organisasi yang selalu berubah merupakan kebijakan yang dibuat oleh induk organisasi pemilih pemula tentang partisipasi politik yang bisa berubah-ubah dan mengontrol pemilih pemula dalam berbagai bentuk aktivitas politik untuk hal ini kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang sistem pelaksanaan pemilihan umum berkaitan dengan data kependudukan dan lain-lain.
2. Pemilih Pemula yang otonom merupakan pemilih pemula yang pada dasarnya berhak untuk mengatur dan memilih pilihan dan keyakinan politiknya sendiri akan tetapi tidak bebas dan masih terikat, dan tetap berada dalam

hubungan induk organisasinya yang menjadi tempat konsultasi dan koordinasi.

3. kurangnya dukungan dari pihak keluarga/lingkungan guna mendampingi kaum minoritas dalam hal ini masyarakat disabilitas akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri pemilih untuk turut serta dalam berpartisipasi pada pemilihan.
 4. Komunikasi individual dengan pejabat politik terkait atau administratif , guna membangun hubungan/ relasi dengan pejabat-pejabat juga merupakan partisipasi politik, hal ini sah-sah saja untuk dilakukan asal tidak melanggar aturan yang ada.
- c. Partisipasi politik

Menurut Sundariningrum mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

1. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
2. Partisipasi Tidak Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Angell mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

1. Faktor usia adalah faktor yang dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap segala bentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Mereka yang berasal dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung akan lebih banyak ikut berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
2. Jenis Kelamin Dalam kultur berbagai bangsa begitu banyak yang mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan yang ideal merupakan “di dapur” yang artinya

bahwa dalam ruang lingkup kemasyarakatan peranan perempuan yang paling utama merupakan mengurus rumah tangga, akan tetapi seiring berjalannya konsep berpikir dan zaman semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Penghasilan dan pekerjaan. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya karena pekerjaan seseorang menentukan berapa penghasilan yang akan diterimanya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari bisa mendorong seseorang untuk ikut serata berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
4. Lamanya Tinggal. Lamanya seseorang yang tinggal didalam sebuah lingkungan tertentu dan sejauh mana pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sekitar akan mampu mempengaruhi partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka secara tidak langsung rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

d. Budaya politik

Gabriel Almond menggolongkan budaya politik menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Budaya Politik Parokial

Yang dimaksud dengan budaya politik parokial adalah tingkat keikutsertaan masyarakat yang ada di daerah tertentu itu sangat sedikit, atau sangat rendah. Golput atau golongan putih adalah salah satu contohnya. Mereka menganggap kalau mereka tidak harus menyumbangkan suaranya dalam pemilu atau pemilihan umum. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi

salah satu penyebab munculnya budaya politik parokial ini.²³

2. Budaya Politik Kaula

Budaya politik kaula adalah tingkat keikutsertaan masyarakat masih pasif. Dalam budaya politik ini, masyarakatnya sudah lebih maju, tapi pemikirannya masih pasif atau kurang memiliki semangat untuk mengikuti budaya ini.

3. Budaya politik partisipan

Budaya politik partisipan adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk berbudaya politik sudah sangat tinggi. Masyarakat ini sudah menyadari bahwa peran mereka dalam pelaksanaan budaya politik sangat dibutuhkan dan mereka berusaha untuk memenuhinya.²⁴

e. Prilaku Pemilih

Jack C. Plano, studi dalam perilaku pemilih merupakan sebagai suatu studi yang pada dasarnya memusatkan diri pada bidang yang mengikuti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang kenapa mereka bisa melakukan pilihan itu.²⁵

Menurut Prof. Afan Gaffarr yang dikutip oleh Asfar, sejauh ini penjelasan-penjelasan teoritis mengenai perilaku pemilih (*voting behavior*) dilandaskan kepada tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia), pendekatan psikologis (Mazhab Michigan), dan pendekatan rasional (Mazhab Virginia).²⁶

1. Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

Pendekatan ini pada umumnya menjelaskan

²³ Almond, Gabriel dan Sidney Verba.1984. "Budaya Politik Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi Di Lima Negara". Bina Aksara

²⁴ Ibid hlm. 27

²⁵ Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hlm. 285

²⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), Hlm. 47.

bagaiman karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mampu mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan perilaku seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya) dan karakteristik latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya) adalah faktor yang begitu penting dalam menentukan pilihan politik.

Lebih singkatnya kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua- muda), jenis kelamin (Pria dan wanita), agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup signifikan untuk penentuan dan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan didalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi; serta pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, adalah suatu hal yang begitu vital (penting) untuk memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

Menurut Dean Jaros Dkk, menyederhanakan kelompok sosial kedalam tiga kelompok yaitu:

Kelompok kategori, kelompok primer, dan kelompok sekunder.²⁷

- a. Kelompok kategori, merupakan kelompok yang terdiri atas berbagai macam orang yang mempunyai karakteristik politik yang berbeda dan secara tidak langsung mereka tidak menyadari karakteristik dan tujuan kelompoknya, karena perbedaan ini terjadi disebabkan oleh masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda-beda terhadap segala bentuk

²⁷Dean Jaros, dkk, *Political behavior: Choice and perspectives*. (New York: St. Martin's Press, 1974), Hlm. 111-146.

peristiwa politik, peran-peran social, pengalaman politik dan pengelompokan kategori ini terbentuk atas dasar faktor-faktor seperti halnya perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, dan perbedaan pendidikan.

- b. Kelompok sekunder, kelompok ini merupakan kelompok yang menyadari dan mampu mengidentifikasi tujuan dari kelompoknya dan memiliki ikatan psikologis anggota terhadap kelompoknya, kelompok ini diklasifikasikan sebagai pekerjaan, kelas sosial dan status sosial ekonomi, dan kelompok-kelompok etnis seperti ras, agama, dan daerah asal.
- c. Kelompok primer, kelompok ini memiliki pengaruh yang paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik seseorang, kelompok ini mampu melakukan kontak dan interaksi langsung secara teratur dan sering, mereka yang termasuk kedalam kelompok ini yaitu, pasangan suami istri, orang tua dan anak-anak, serta teman sepermainan.

Gerald Pomper merincikan pengaruh dari pengelompokan sosial dalam studi voting behavior kedalam dua variable, yaitu variable predisposisi sosial-ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial-ekonomi pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial ekonomi dan keluarga pemilih memiliki tingkat keterikatan hubungan yang signifikan dengan perilaku pemilih seseorang. Preferensi- preferensi politik keluarga, begitu berpengaruh kepada keseluruhan keluarga, predisposisi social ekonomi ini bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis, dan sebagainya.

2. Pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan)

Bentuk sosialisasi politik yang sering diterima seseorang pada masa kecil (baik lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah) contohnya, sangat berpengaruh terhadap pilihan politik mereka khususnya

pada saat pertama kali menentukan pilihan politik. Kelompok penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai tolak ukur dari kepribadian seseorang, menjadi variabel yang cukup dalam hal penentuan perilaku politik seseorang. Oleh sebab itu, pendekatan psikologis lebih menekankan kepada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat/ calon.

Pendekatan Psikologi memaparkan perilaku pemilih dapat ditentukan oleh kekuatan psikologis yang terus berkembang dalam diri seorang pemilih sebagai produk dari proses sosialisasi. Dalam Proses sosialisasi ini, nantinya akan terbentuk sikap individu dan dapat mempengaruhi perilaku pemilih.

Menurut Fred I. Greenstein mempunyai tiga fungsi,²⁸ yaitu:

- a). Sikap adalah fungsi kepentingan, yang artinya penilaian terhadap objek di berikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.
- b). Sikap sebagai fungsi dalam penyesuaian diri, artinya seseorang akan bersikap sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang diseganinya atau kelompok tertentu.
- c). Sikap sebagai fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, merupakan sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi sebuah konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan, eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, danidentifikasi.

Menurut Afan Gaffar dalam Mazhab Michigan, pendukung Mazhab ini menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam

²⁸ Fred I. Greenstein, *Kepribadian dan Politik*, (Chicago: Perusahaan PenerbitanMarkham1969), Hlm. 184

dirinya sendiri melalui proses sosialisasi politik.²⁹

2. Pendekatan rasional

Menurut Ramlan Subakti dalam studi perilaku pemilih, pemilih rasional yang diadaptasi dari ilmu ekonomi ini biasanya lebih kepada menggunakan perhitungan untung rugi dalam menentukan pilihan politiknya, perilaku pemilih rasional tidak hanya berupa pemilih alternative yang paling menguntungkan atau yang mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam arti pemilih alternative yang menimbulkan resiko yang paling kecil.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dengan melihat fenomena atau kejadian sosial secara nyata (diamati langsung) dan kemudian dikemas dalam bentuk laporan sehingga hasilnya dapat dipahami.³¹

Sebagai langkah awal guna melakukan suatu penelitian merupakan membentuk langkah dalam penelitian yang dirasa relevan dengan permasalahan yang akan dikaji maka oleh karena itu pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, yaitu untuk mengamati hidup seseorang, berinteraksi dengan mereka dan berusaha untuk memahaminya. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,

²⁹ Afan Gaffar, *Javaners Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), Hlm. 52.

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm.52.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cetakan keempat 2016).hlm 80

dimana peneliti dalam hal ini merupakan sebagai instrumen kunci, teknik dalam proses pengumpulan data dilakukan secara gabungan dan analisis data dilakukan secara gabungan, analisis ini bersifat kualitatif, dan hasil penelitiannya harus lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³²

Penelitian menggunakan kualitatif lebih menekankan peneliti untuk bisa menganalisis proses dalam penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan memakai logika ilmiah. Hal tersebut berarti menggunakan pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan cara studi diskriptif karena relevan dengan sifat masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dan bukan menguji hipotesis, dan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk proses pencarian data dan informasi yang pada tahapan itu juga berusaha untuk memperoleh gambaran nyata tentang “Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Terhadap Pilkada Lombok Tengah Di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”.

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian merupakan sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data, serta peneliti mengajukan beberapa pernyataan yang sejalan dan menyangkut isi dari penelitian dan peneliti juga secara langsung melibatkan diri dan berbaur didalamnya untuk mengetahui kegiatan subjek dan segala hal yang berkaitan dengan subjek peneliti yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan jadwal penelitian. Sehingga nantinya peneliti mampu mendapatkan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung jawabkan dan dalam pengumpulan data

³²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2018), hlm 8.

peneliti berusaha mengumpulkan data yang diperoleh baik dari hasil *interview* (wawancara), observasi, dan metode dokumentasi.

Sebelum peneliti turun langsung ke lapangan, peneliti memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak-pihak atau instansi-instansi terkait yang bertanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku. Peneliti hadir sebagai pewawancara atau pengumpul data tanpa mempengaruhi kehidupan subjek.

peneliti hadir dilapangan, peneliti memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak-pihak atau instansi-instansi terkait yang bertanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku. Peneliti hadir sebagai pewawancara atau pengumpul data tanpa mempengaruhi kehidupan subjek.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian oleh peneliti yaitu kelurahan Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

4. Data dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian sehingga nantinya peneliti mendapat data yang akurat dan cocok dengan situasi yang empiris dan melakukan fungsi dari teori, yaitu meramalkan, menerangkan, dan ditafsirkan.³³ Dan untuk keakuratan, kualitas, dan validitas informasinya di mana sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, dari data yang dulunya belum ada harus dicari dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti.³⁴ Yang menjadi sasaran untuk memperoleh sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu masyarakat dan pihak lembaga terkait.

b. Sumber data sekunder

³³Saebani, "*Metodelogi Penelitian*", (Bandung, Pustaka Setia, 2006), Hlm. 93.

³⁴Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hlm. 30-31.

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian data telah tersedia.³⁵ baik dari buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, maupun literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti data daftar pemilih pada pilkada kabupaten Lombok tengah yang di dapatkan di KPU Kabupaten Lombok Tengah, PPS Kelurahan dan literasi lainnya yang menyediakan data terkait permasalahan penunjang penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Prosedur dalam melakukan pengumpulan data adalah salah satu hal yang begitu penting bagi sebuah penelitian sehingga nantinya data yang akan diperoleh bisa benar-benar sesuai dan relevan dengan judul yang ditentukan. Teknik pengumpulan data tergantung pada permasalahan yang akan dikaji, demikian pula dalam pemilihan permasalahan yang akan dikaji, peneliti hendaknya sudah memikirkan kemungkinan dapat dikumpulkannya data yang diperlukan.³⁶

Dan teknik untuk pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.³⁷ Dalam penelitian yang dilakukan, teknik yang digunakan penelitian adalah:

a. Teknik observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian,³⁸ jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, yaitu peneliti menggali data dengan cara terlibat langsung secara

³⁵*Ibid.*, hlm.31.

³⁶Murti Sumarni, Salamah Wahyuni, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2006), Hlm. 85.

³⁷Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan R&D*”, (Bandung, Alfabeta, 2006), Hlm. 193.

³⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi reserch* jilid II, t.t., 74.

aktif dalam objek yang diteliti atau ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi³⁹.

b. Teknik wawancara

Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara semi terstruktur. Dimana agar peneliti lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam sesuai dengan yang diharapkan peneliti tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 6 (enam) subjek pada masyarakat kelurahan leneng.

c. Teknik dokumentasi

Metode dokumentasi sangat peneliti butuhkan untuk mencari data-data, hal-hal, variable yang berupa photo dan rekaman. Dokumentasi yang dimaksud harus sesuai dengan jenis data yang ditetapkan atau yang dibutuhkan. Teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara.

Adapun data yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi merupakan data tentang gambaran umum lokasi dan data kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh objek yang akan diteliti.

Sedangkan dokumentasi menurut Ridjal yang dimaksud dengan dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa masa lalu tersebut. Dokumentasi menurut Sugiyono adalah catatan-catatan peristiwa yang telah

³⁹Yulin Citriadin, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, (Mataram, Kalangan Sendiri, 2007), Hlm. 65

lalu, yang biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.⁴⁰

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dalam mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan aturan dasar, dikarenakan data tersebut masih bersifat bertebaran, sehingga nantinya peneliti diwajibkan mengklasifikasikan ke dalam kategori tertentu untuk mendapatkan pemaknaan terhadap data.⁴¹

Untuk mengelompokkan data yang telah peneliti peroleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi penulisan menggunakan analisis data yang ditampilkan secara deskriptif berupa ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat dan dipisahkan menurut kategori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dan rinci, prinsipnya teknik-teknik analisis data menggunakan analisis induktif.

7. Uji Keabsahan Data

Peneliti pada bagian ini perlu menjelaskan apa saja yang dilakukan untuk lebih menjamin keabsahan dan temuan data, yaitu:

a. Pembahasan Teman Sejawat

Pembahasan teman sejawat dilakukan melalui diskusi. Cara ini adalah salah satu teknik yang dilakukan dengan mengekspos hasil penelitian yang diperoleh dari hasil diskusi dengan teman sejawat. Sehingga diharapkan setelah mendengar pendapat dari berbagai pihak dapat menjadi masukan yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian .

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk memperluas pengecekan atau perbandingan terhadap

⁴⁰Ibrahim, “*Metodologi penelitian kualitatif*”, (Alfabeta, Bandung, 2018), Hlm, 94.

⁴¹Rachmat Kriyantono, “*teknik praktis riset komunikasi*”, (Jakarta, Kencana, 2006), Hlm, 196.

data yang diperoleh. Dalam hal ini bertujuan untuk mengecek kebenaran dengan hasil penelitian dengan membandingkan serta memanfaatkan sesuatu yang lebih baik atau sumber kunci informasi dalam mengecek ini data dilakukan dengan triangulasi dalam pengerjaan kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu.⁴²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data yang sama tetapi pada sumber yang berbeda.

2. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian kualitatif, peneliti mendeskripsikan secara rasional pada masing-masing bab. Jadi, penelitian kualitatif ini terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I: Pada bab ini peneliti membuat proposal yang menjadi titik acuan penting dalam pembuatan skripsi. Sebagai pendahuluan peneliti menjelaskan alasan dari pengambilan judul serta yang melatarbelakangi masalah-masalah yang muncul sehingga peneliti mempersiapkan strategi- strategi yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Pada Bab ini dijelaskan mulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II: Pada bab ini peneliti menyajikan seluruh data dan temuan selama proses penelitian berlangsung dilapangan, peneliti juga melakukan penelitian semaksimal mungkin guna terpenuhi rencana yang telah disusun pada bab sebelumnya.

BAB III: Pada bab ini berisi pembahasan, peneliti tidak akan menulis ulang data-data atau temuan yang telah peneliti ungkap pada Bab II, namun pada bab ini peneliti akan mengungkapkan hasil analisis terhadap temuan penelitian

⁴² Lexy J. Meloeng, "Metode...", Hlm. 327.

sebagaimana dipaparkan pada Bab II berdasarkan pada perspektif penelitian atau yang disebut sebagai kerangka teoritik yang telah dibuat pada Bab I Pendahuluan.

BAB IV: Pada bab ini berisi penutup, Sebagai bab terakhir atau bab penutup, pembahasan yang akan peneliti uraikan disini adalah penarikan kesimpulan dari analisis terkait data-data yang sesuai dengan masalah yang telah peneliti rumuskan pada Bab I sebagai rumusan masalah. Semaksimal mungkin peneliti tidak akan menyimpulkan sesuatu yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Bukan hanya kesimpulan, namun pada bagian ini peneliti juga akan menulis saran-saran kepada stake holder yang terkait yang peneliti anggap penting untuk dilakukan dikemudian hari.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kelurahan Leneng merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Letak kelurahan Leneng sangat mudah di temukan karena letaknya yang berada di tengah pusat kota praya dan menjadi pintu masuk gerbang kota yang dikelilingi oleh pusat perdagangan, pendidikan, keagamaan dan pemerintahan. Jarak Kelurahan Leneng dengan ibukota kecamatan di kecamatan Praya yaitu 5 km dengan jarak tempuh 11 menit menggunakan kendaraan.

Luas wilayah kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah:

I. Luas dan batas wilayah

- a. Luas wilayah : 328,77 Ha
- b. Batas wilayah
 - Sebelah Utara : Kelurahan Renteng
 - Sebelah Selatan : Kelurahan Panjisari
 - Sebelah Timur : Kelurahan Praya
 - Sebelah Barat : Desa Puyung

II. Keadaan Geografis

- a. Ketinggian tanah dari permukaan air laut : 150 m
- b. Banyaknya curah hujan : 505 mm
- c. Tofografi (dataran tinggi, rendah, pantai) : datar
- d. Suhu udara rata-rata : 28 C- 30 C55



sumber: google

III. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan kelurahan)

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 1,5 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 1,2 km
- c. Jarak dari ibukota propinsi : 33 km

2. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung maka dalam hal ini penulis mendapatkan keterangan berupa data tertulis bahwa penduduk kelurahan leneng sebagian besar Beragama islam, tapi juga terdapat beberapa agama lain yang dianut disana. Data dapat dilihat dalam table dibawah:

Table. 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA	2019	2020
1.	ISLAM	7.594	8.349
2.	KRISTEN	-	27
3.	KATHOLIK	25	9
4.	HINDU	8	290
5.	BUDHA	264	8
6.	KEPERCAYAAN TERHADAP TYME	7	-

Sumber. Data Monografi Kelurahan Leneng

3. Organisasi Sosial Keagamaan

Organisasi sosial keagamaan merupakan kelompok dalam ruang lingkup sosial dan keagamaan yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama di masing-masing anggotanya. Pentingnya organisasi sosial dan keagamaan dalam masyarakat karena organisasi ini mempunyai fungsi sebagai tempat partisipasi dan proses pendekatan diri dengan yang diyakininya dan berfungsi dalam proses pembangunan atau dalam artian mewujudkan cita-cita sebuah bangsa. Sedangkan dikelurahan Leneng sendiri memiliki berbagai macam jenis organisasi sosial keagamaan, antara lain:

Table. 2. 2.
Organisasi Social Keagamaan

NO	JUMLAH ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN	2019	2020
1	JUMLAH ORGANISASI SOSIAL	6	20
2	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3	20
3	TOKOH MASYARAKAT	62	100

Sumber: *Data Monografi Kelurahan Leneng*

4. Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorin dalam jangka waktu yang panjang dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalamia kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga Negara lainnya. Penyandang disabilitas dapat kita jumpai diberbagai daerah dengan jumlah dan macam-macam jenis disabilitas yang diderita berbeda-beda. Data Penyandang Disabilitas di Kelurahan Leneng bisa kita di tabel dibawah ini:

Table. 2. 3.
Data Disabilitas Di Kelurahan Leneng

NO	NAMA	JENIS DISABILITAS	JUMLAH
1	IHWAN	TUNA NETRA	1
2	PAN	TUNA NETRA	1
3	ALIMUDIN	TUNA DAKSA	1
4	FAHRUR AZMI	TUNA RUNGU	1

Sumber: *Data Monografi Kelurahan Leneng*

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, kreatifitas, dan pembiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pelatihan, pengajaran dan penelitian. Pendidikan terjadi dibawah bimbingan orang lain, dan juga otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berfikir, merasa dan tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan pada umumnya dibagi menjadi beberapa tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian sekolah diperguruan tinggi.

Table. 2. 4.

Pendidikan di kelurahan leneng

No	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Siswa	Gedung	Guru	Siswa
1	TK	—	8	—	3	27	383
2	SD/MI	2	14	1.00	3	56	700
2	SLTP/M			0			

3	TS	1	2	59	2	61	600
4	SLTA/M	—	—	—	2	34	200
5	A	—	—	—	—	—	—
6	AKADEMI	1	30	400	—	—	—
7	PT/IPDN						
	JUMLAH	4	54	1.45	10	178	1.88
				9			3

Sumber: Data Monografi Kelurahan Leneng

B. Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Dalam Pilkada LOMBOK Tengah di Kelurahan Leneng

Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan politik. Begitu banyak bentuk partisipasi politik akan tetapi proses pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar.

1. Partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara

Salah satu indikator partisipasi politik dalam pilkada adalah proses atau tahapan dalam pemberian. Bagi masyarakat disabilitas kesempatan keikutsertaan dalam pilkada Kabupaten

Lombok Tengah ini tentu saja menjadi sangat berarti karena ini akan menjadi contoh untuk masyarakat disabilitas lainnya yang enggan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat disabilitas. Dalam hal ini untuk mengetahui partisipasi pemilih penyandang disabilitas, dalam memberikan suara pada pilkada kabupaten Lombok tengah di kelurahan leneng. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu penyandang disabilitas Tuna Netra yang bernama Ihwan, mengatakan bahwa:

“ya, saya ikut memberikan hak suara saya, karena saya diajak oleh keluarga juga untuk mendampingi ke TPS”.⁴³

Lebih lanjut dijelaskan, berdasarkan wawancara dengan narasumber masyarakat penyandang disabilitas tuna netra yang bernama Saudara Pan, yang mengatakan bahwa:

“tidak begitu tau tentang partisipasi politik, tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik seperti kampanye. Hanya terlibat dalam hak pemberian suara dan itupun tidak begitu diperhitungkan karena keterbatasan fisik yang saya miliki”.⁴⁴

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa partisipasi politik masyarakat disabilitas seorang penyandang Tuna Netra hanya terlibat dalam pemberian hak suara saja, pada pilkada Lombok tengah.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan yang bernama inak Lusi selaku tetangga dari saudara ihwan penyandang disabilitas tuna netra, yang mengatakan bahwa:

⁴³ Ihwan, wawancara, Leneng, 20 April 2022.

⁴⁴ Pan, wawancara, Leneng, 20 April 2022

“ya mau gak mau kita sebagai tetangga terdekat harus membantu saudara ihwan untuk pergi ketempat pemungutan suara, karena kalau bukan kita sebagai orang terdekat ya siapa lagi”.⁴⁵

Lebih lanjut dijelaskan dalam hasil wawancara peneliti dengan Saudara kandung yang bernama badri dari penyandang disabilitas Tuna Netra bernama saudara Pan yang mengatakan bahwa:

“saya sedikit kewalahan dalam menuntun kakak saya ini dalam melakukan pemilihan ke TPS, karena jaraknya agak lumayan jaraknya dari rumah saya”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dilapangan, peneliti dalam hal ini dapat menarik kesimpulan bahwa para penyandang disabilitas belum mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan akses dalam hal sosial politik. Masyarakat sekitar mempunyai kemandirian yang cukup bagus dalam pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas. Keinginan ikut berpartisipasi penyandang disabilitas tidak didukung dengan fasilitas dan aksesibilitas yang ada.

Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan bahwa pilkada kabupaten Lombok tengah dilaksanakan pada tahun 2020 sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 namun pada saat pemilihan dilaksanakan peneliti dalam hal ini ikut terlibat menjadi penyelenggara atau petugas TPS. Temuan yang peneliti temukan di lapangan melihat pemilih penyandang disabilitas masih terlihat kesulitan untuk datang ke TPS dan hanya segelintir orang yang mempunyai kepekaan untuk mengingatkan para penyandang disabilitas untuk datang memilih. Peneliti juga dalam hal ini menemukan masih banyaknya petugas yang kesulitan dalam membimbing penyandang disabilitas untuk menentukan pilihannya.

2. Kegiatan kampanye

⁴⁵ Lusi, wawancara, 24 Mei 2022.

⁴⁶ Badri, wawancara, 24 Mei 2022.

Keikutsertaan dalam kampanye politik begitu penting bagi masyarakat penyandang disabilitas, karena tahapan ini dapat membantu dalam proses kegiatan politik dan dalam mengenal calon yang akan dipilih serta mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat disabilitas akan pentingnya keikutsertaan dalam partisipasi politik. Adapun hasil wawancara dari salah satu masyarakat disabilitas Tuna Netra yang bernama ihwan, yang mengatakan bahwa:

“saya tidak begitu terlibat dalam kegiatan kampanye politik, saya hanya dengar di orang sekitar dan lebih banyak diam dirumah. Dan lebih memilih melakukan kegiatan disekitar rumah”⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan kampanye politik masih banyak masyarakat penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan akses untuk terlibat dalam kampanye politik karena keterbatasan fisik yang mereka miliki.

Hal serupa juga diungkapkan oleh fahrur Azmi masyarakat penyandang disabilitas Tuna Rungu dalam hal ini proses wawancara dibantu oleh ayahnya yang bernama jaswadi mengatakan bahwa:

“saya tidak begitu mau ikut campur dalam hal kampanye politik, palingan saya hanya lihat-lihat sekilas di media social”⁴⁸

Hasil wawancara juga diungkapkan oleh jaswadi ayah dari penyandang disabilitas Tuna Rungu yang bernama fahrur azmi yang mengatakan bahwa:

”saya sebagai ayahnya selalu membantu disaat akan ada pemilihan-pemilihan seperti ini, karna lawan bicara anak saya ini sedikit kesulitan dalam hal komunikasi”⁴⁹

⁴⁷ Ihwan, wawancara, 20 April 2022.

⁴⁸ Fahrur azmi, wawancara, 20 Mei 2022

⁴⁹ jaswadi, wawancara, 24 Mei 2022.

Hasil wawancara berbeda di ungkapkan oleh Alimudin penyandang disabilitas tuna daksa yang mengatakan bahwa:

“saya hanya dengar-dengar diwarga sekitar yang sering bahas politik, jadi sedikit tidak tau/kenal dengan calon yang akan dipilih”.⁵⁰

Hasil wawancara juga diungkapkan oleh sirah istri dari penyandang disabilitas Tuna Daksa yang bernama alimudin yang mengatakan bahwa:

“kampanye itu pengenalan nama calon itu ya? Ungkapnya, kalok itu pernah saya denger-dengar dari tetangga, tapi tidak terlalu fokus kesana”⁵¹

Berikut hasil wawancara dengan petugas KPPS kelurahan leneng yang bernama saudari widya yang mempunyai peran dalam pemenuhan informasi di tingkat bawah, yang mengatakan bahwa:

“Informasi sudah saya sampaikan mengenai bagaimana mekanisme pemilihan, kapan akan diadakan pemilihan dan dalam proses melayani pemilih, tapi ya lagi-lagi kesadaran politik dari yang bersangkutan kita perlukan juga”.⁵²

Dari hasil wawancara di atas peneliti dalam hal ini melihat bahwa tingkat keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas dalam kampanye politik terlihat bahwa mereka lebih banyak pasif dalam hal keikutsertaan kampanye politik. Diketahui pula bahwa di satu sisi mereka tidak memiliki pengetahuan serta aksesibilitas dalam hal tersebut. Petugas sudah memberikan informasi akan tetapi tidak begitu intens dan belum merata, kesulitan para penyandang disabilitas dalam mengenal calon dan proses mekanisme pemilihan juga masih

⁵⁰ alimudin, wawancara 21 April 2022.

⁵¹ sirah, wawancara 24 Mei 2022

⁵² Widya, wawancara, 24 Mei 2022.

menjadi masalah yang terjadi di tengah-tengah penyandang disabilitas.

Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan bahwa masih banyak tim sukses calon yang pada saat melakukan kampanye hanya melibatkan pemuda dan tokoh masyarakat yang berpengaruh pada saat itu. Peneliti menemukan bahwa para penyandang disabilitas tidak ikut dilibatkan dan dugaan awal dari peneliti karna faktor jumlah yang sedikit menjadi penyebab para penyandang disabilitas tidak begitu dilibatkan.

Setelah peneliti melakukan analisis berdasarkan deskripsi temuan dilapangan dalam hal ini peneliti memperoleh gambaran bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari individu pemilih penyandang disabilitas. Faktor internal bisa dilihat dari partisipasi politik yang dipengaruhi oleh adanya faktor psikologis dan pendidikan politik penyandang disabilitas. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pemilih penyandang disabilitas dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi pemilih penyandang disabilitas, kurangnya petugas yang menangani khusus disabilitas dan minimnya sosialisasi secara khusus bagi penyandang disabilitas.

Table. 2.4.

Perpustakaan UIN Mataram
Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota

No	DATA PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH AKHIR	
			LK
1	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas	PR	244
		JML	459

2	Jumlah Seluruh	LK	173
	Pemilih Disabilitas	PR	198
	Yang Menggunakan Hak Pilih	JML	371

Sumber. *JDIH. KPU Kabupaten Lombok Tengah*

C. Faktor yang mendukung dan menghambat Partisipasi politik masyarakat Disabilitas dalam pilkada Lombok Tengah di Kelurahan Leneng

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam partisipasi politik masyarakat disabilitas terdapat beberapa faktor pendukung dalam keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas dalam Pilkada Lombok Tengah di Kelurahan Leneng. Adapun faktor-faktor tersebut diantara ialah sebagai berikut:

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam hal mendukung dan mengedukasi penyandang disabilitas dalam berbagai bentuk aktifitas. Selain itu tetangga dan teman juga mempunyai peran dalam memberikan stimulus positif bagi penyandang disabilitas untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas Tuna Daksa yang bernama alimudin yang mengatakan bahwa:

“pada hari pencoblosan pemilihan pilkada Lombok Tengah, saya di ajak oleh istri saya untuk menggunakan hak pilih saya, awalnya saya sempat menolak karena saya sadar letak keterbatasan fisik saya, namun karena adanya dorongan dari keluarga saya sehingga saya ikut berpartisipasi dalam pemilihan”.⁵³

⁵³ Alimudin, wawancara, 21 April 2022

Lebih lanjut dijelaskan, berdasarkan wawancara dengan narasumber masyarakat penyandang disabilitas tuna netra yang bernama Saudara Pan, yang mengatakan bahwa:

“jelas saya membutuhkan bantuan dari orang terdekat saya, dan itu dirasa sedikit membantu saya untuk pergi ke TPS”.⁵⁴

Lebih lanjut dijelaskan dalam hasil wawancara peneliti dengan Saudara kandung yang bernama badri dari penyandang disabilitas Tuna Netra bernama saudara Pan yang mengatakan bahwa:

“saya yang bantu kakak saya pergi ke TPS, karna keterbatasan yang dia miliki jadi sudah menjadi tugas saya dalam hal tersebut”.⁵⁵

b. Lokasi Pemungutan Suara

Lokasi tempat pemungutan suara yang dekat, lengkap dan aman dapat berpengaruh dan menguntungkan bagi masyarakat penyandang disabilitas, sehingga dapat menunjang pemilih untuk pergi memilih dan masyarakat penyandang disabilitas merasa aman dan terfasilitasi untuk melakukan partisipasi politik.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat penyandang disabilitas Tuna Netra yang bernama Ihwan, yang mengatakan bahwa:

“di pemilihan-pemilihan sebelumnya saya tidak hadir di tempat pemungutan suara karena tempatnya jauh, dan sedikit menyulitkan saya yg mempunyai keterbatasan fisik, alhamdulillah di pilkada yang kemarin saya hadir karena tempatnya dekat dan saya dibantu tetangga untuk menuju lokasi pemungutan suara sehingga saya merasa aman kesana”.⁵⁶

⁵⁴ Pan, wawancara, 20 April 2022.

⁵⁵ Badri, wawancara 24 Mei 2022.

⁵⁶ Ihwan, wawancara, 20 April 2022.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan yang bernama inak Lusi selaku tetangga dari saudara ihwan penyandang disabilitas tuna netra, yang mengatakan bahwa:

“jaraknya memang agak lumayan, saya aja yang memilik fisik yang masih utuh agak sedikit males buat pergi nyoblos, tapi kesadaran yang kita punya yang buat kita untuk pergi, terlebih lagi ini tidak bisa melihat pasti akan merasa berat untuk kesana”.⁵⁷

Hasil obesrvasi awal penliti menemukan hal yang sejalan dengan apa yang di katakan oleh para penyandang disabilitas bahwa peneliti melihat sedikit adanya kemudahan yang di rasakan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak suaranya. Peneliti melihat penyandang disabilitas yang dekat rumahnya dengan TPS terlihat lebih antusias dalam melakukan pemenuhan hak suaranya untuk datang ke TPS. Dan sebagian besar penyandang disabilitas dianter oleh keluarganya pada saat dating ke TPS.

2. Faktor Penghambat

a. Aksesibilitas

Keterbatasan fisik yang dimiliki menjadi masalah utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitas. Tidak sedikit dari penyandang disabilitas merasa kesusahan mengakses tempat pencoblosan ataupun melakukan tahapan kegiatan pemilihan di tempat pemungutan suara. Sehingga banyak dari mereka lebih memilih untuk tidak memberikan hak pilihnya.

TPS sebagai salah satu kelengkapan dalam melaksanakan pemilihan memiliki peranan yang begitu penting, karena ditempat inilah para pemilih melakukan hak pilihnya. TPS yang diharapkan oleh masyarakat penyandang disabilitas adalah TPS aksesibet, yaitu TPS yang menunjang fasilitas

⁵⁷ Lusi, wawancara, 24 mei 2022.

khusus disabilitas dengan tujuan mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas Tuna Netra yang bernama Pan menyatakan:

“iya letak ke tempat nyoblos lumayan jauh, saya merasa kesulitan untuk kesana, apalagi kalau tetangga atau orang terdekat saya tidak ada disini, saya tidak bisa kesana”.⁵⁸

Lebih lanjut dijelaskan dalam hasil wawancara peneliti dengan Saudara kandung yang bernama badri dari penyandang disabilitas Tuna Netra bernama saudara Pan yang mengatakan bahwa:

“sedikit hambatannya sih masalah akses yang tidak mendukung, jadi sedikit menjadi beban”⁵⁹

b. Pendataan

Salah satu factor yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas saat pemilihan kepala daerah di kelurahan leneng, diantaranya adalah pendataan, selama ini pendataan yang dilakukan oleh petugas di terhadap penyandang disabilitas banyak menemui kesulitan karena petugas kurang memahami kondisi penyandang disabilitas.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu petugas KPPS yang bernama Widya, yang mengatakan bahwa:

“untuk masalah pendataan memang kami sedikit mengalami kendala, tidak hanya untuk penyandang disabilitas akan tetapi untuk semua masyarakat pada umumnya, karena kendala ada yang sudah pindah domisili, ada juga yang sudah meninggal tapi datanya masih ada. Terlebih lagi penyandang

⁵⁸ Pan, wawancara 20 april 2022.

⁵⁹ Badri, wawancara, 24 mei 2022.

disabilitas kita terkendala masalah teknis saat proses pendataan”.⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas peneliti dalam hal ini melihat bahwa berbagai macam kendala masyarakat penyandang disabilitas dalam mengikuti segala macam proses politik yang ada. Faktor pendukung dan penghambat yang ada ditengah penyandang disabilitas begitu berpariasi dari kendala teknis dan non teknis.. Diketahui pula bahwa di satu sisi peneliti melihat kurangnya kesadaran politik dari penyandang disabilitas sehingga semua hal yang berkaitan dengan partisipasi politik tidak begitu menarik bagi mereka.

Hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa yang menjadi penghambat penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak suaranya adalah segala bentuk akses yang merujuk kepada penyandang disabilitas, penyelenggara dalam hal ini di tingkat bawah sedikit mengalami kesulitan pada saat pendataan para penyandang disabilitas, ada yang terkendala pada saat komunikasi karena melihat banyak penyelenggara tidak mempunyai skil atau tidak dibekali dengan pengetahuan atau cara berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas. peneliti melihat para penyelenggara melibatkan keluarga para penyandang disabilitas dalam proses pendataan berlangsung.

Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁰ Widy, wawancara 22 April 2022.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Dalam Pilkada Lombok Tengah di Kelurahan Leneng

Pelaksanaan partisipasi politik dalam pilkada kabupaten Lombok tengah di kelurahan leneng tidak terlepas dari para penyandang disabilitas yang ikut serta dalam kontestasi pesta demokrasi dan kesadaran politik yang dimiliki warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat disabilitas, artinya sebagai suatu hal yang dalam hal ini berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan keadaan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi tolak ukur dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik penyandang disabilitas.

Berbagai macam kultur masyarakat yang ada di kelurahan Leneng.

Pelaksanaan partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat penyandang disabilitas maka dapat dilakukan analisis menurut teori bentuk partisipasi konvensional menurut Gabriel Almond dengan 2 indikator yaitu:

1. Pemberian Suara

Sederhananya bentuk partisipasi politik yang normal dan legal misalnya dalam proses pemberian suara. Masyarakat penyandang disabilitas lebih memilih untuk menggunakan hak suaranya karena hal tersebut yang sedikit tidak dapat dijangkau oleh kebanyakan penyandang difabel dikarenakan hambatan yang berarti bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan politik lainnya. Didalam pemberian hak suara hambatan yang sering didapatkan penyandang disabilitas adalah faktor teknis dikarenakan keterbatasan fisik yang memaksa mereka tidak dapat melakukan aktifitas ketika tidak ada yang mendampingi. Kendala yang menjadi penghambat mereka juga ditimbulkan rasa minder untuk pergi ke TPS. Kendala lain dikarenakan administrasi dan aksesibilitas

menuju TPS yang sulit untuk dijangkau tanpa pendampingan dari orang lain.

2. Kampanye

Salah satu kegiatan yang teragenda pada tahapan pilkada adalah kampanye pemilihan yang pada fungsinya untuk memperkenalkan dan meyakinkan pemilih untuk memilih calon pasangan tertentu. Peserta dalam kampanye itu sendiri adalah masyarakat umum tidak terkecuali masyarakat penyandang disabilitas.

Dari 4 orang penyandang disabilitas di kelurahan leneng menyatakan tidak ikut terlibat dalam kampanye politik, hal tersebut dikarenakan keterbatasan fisik mereka ditambah minimnya kesadaran politik dikalangan penyandang disabilitas bahwa pentingnya ikut kegiatan kampanye dalam rangka ikut meramalkan pesta demokrasi, bagi mereka memberikan hak suara mereka itu sudah lebih dari cukup.

pemilih difabel di Kelurahan Leneng masih kurang mendapatkan sosialisasi dari penyelenggara yang dikhususkan bagi mereka. Hal ini cukup berpengaruh terhadap perilaku pemilih dan dalam proses tahapan partisipasi pemilih difabel. Mereka ingin menggunakan hak pilihnya, namun sosialisasi yang mereka dapatkan sangat minim. Dalam tahapan ini yang menyebabkan pemilih difabel menjadi tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilihnya.

Selain itu, penyandang disabilitas di Kelurahan Leneng merasa masih kurang dilibatkan dalam tahapan Pilkada Kabupaten Lombok Tengah. Di satu sisi mereka tidak mendapatkan sosialisasi khusus pemilih difabel dari pihak penyelenggara, mereka juga tidak terlibat sebagai lembaga pengawas ataupun menjadi petugas pemilihan di daerah mereka. Minimnya perspektif yang dimiliki oleh pihak penyelenggara kepada pemilih difabel ini membuat kebanyakan pemilih difabel merasa kurang diperhatikan oleh pihak penyelenggara. Karena jumlah mereka yang sangat minim jika dibandingkan dengan pemilih non-difabel membuat keberadaan mereka terkadang tidak diketahui oleh

pihak penyelenggara.

Tidak hanya itu, akibat dari minimnya sosialisasi yang diberikan kepada mereka, pengetahuan pemilih difabel terhadap calon yang akan dipilihnya membuat mereka merasa khawatir takut calon yang akan dipilihnya tidak bisa amanah. Tentu saja mereka sebagai pemilih difabel juga pastinya memiliki kepentingan-kepentingan yang diharapkan akan dapat terealisasi di kepemimpinan selanjutnya. Mereka berharap hak-hak mereka yang sudah di atur dalam Undang-Undang dapat terealisasi dengan baik. Contoh salah satunya seperti menciptakan lingkungan yang ramah bagi difabel sehingga dapat memudahkan difabel untuk melakukan kegiatan mereka.

Jika kita melihat dari teori partisipasi politik berdasarkan kesadaran politik yang dikemukakan oleh Huntington & Nelson, partisipasi pemilih difabel di Kelurahan Leneng berdasarkan kesadarannya mereka termasuk ke dalam kesadaran yang otonom yang artinya partisipasi masyarakat yang dilakukan secara spontan atas keinginan sendirinya.

Hal ini bisa kita lihat dari beberapa faktor yaitu pertama, pemilih difabel tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak penyelenggara. Kedua, pemilih difabel juga tidak dilibatkan dalam proses tahapan pemilihan sehingga mereka berpartisipasi hanya pada saat pemberian hak suara saja. Ketiga, pemilih difabel merasa calon yang tersedia dirasa tidak merepresentasikan kepentingan mereka. dari ketiga hal tersebut partisipasi pemilih difabel di Kelurahan Leneng berdasarkan kesadaran politiknya mereka termasuk ke dalam partisipasi yang otonom.

B. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Dalam Pilkada Lombok Tengah Di Kelurahan Leneng

1. Faktor pendukung

a. Lingkungan Keluarga

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat disabilitas dalam politik. Tetapi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah faktor pendukung dan penghambat masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan atau aktivitas politik dalam pilkada. Pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia) yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas.⁶¹

Penyandang disabilitas yang mempunyai rasa kepedulian social terhadap permasalahan social, politik tentu akan mau terlibat dalam aktifitas atau organisasi politik. Dengan adanya kemauan dari penyandang disabilitas sangat mempengaruhi mereka untuk mau berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, misalnya dengan adanya kepedulian baik dari keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar untuk mengajak mereka menggunakan hak pilihnya ke TPS serta didukung dengan adanya keramahan dari petugas TPS dalam menangani penyandang disabilitas.

b. Faktor situasi atau lingkungan politik

Kondisi lingkungan politik yang kondusif dan ramah bagi masyarakat disabilitas tentu akan membuat orang dengan senang hati untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Keadaan lingkungan yang demokratis dalam kehidupan penyandang disabilitas sangat mempengaruhi mereka untuk mau ikut serta berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, misalnya ada kepedulian dari keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar untuk mengajak mereka

⁶¹ Lester W Milbrath, Partisipasi Politik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm.

menggunakan hak pilihnya ke TPS serta adanya keramahan dari petugas KPPS dalam menangani penyandang disabilitas.

Selain itu lingkungan politik juga bisa dikaitkan dengan ketersediaan aksesibilitas yang baik dan ramah bagi penyandang disabilitas saat menuju TPS. Dengan cara menempatkan penyandang disabilitas di lokasi TPS yang paling dekat dengan tempat tinggalnya tentu perlakuan tersebut akan mendukung mereka untuk berpartisipasi pada pilkada di Lombok tengah.

Keberadaan TPS yang jauh dari tempat tinggal penyandang disabilitas berkaitan erat dengan ketersediaan transportasi yang mendukung untuk menggunakan hak pilihnya di TPS khususnya bagi penyandang disabilitas netra dan daksa. Adanya keinginan dari dalam diri mereka untuk memilih namun tidak dibarengi dengan ketersediaan transportasi untuk menuju ke TPS maka dapat mengurungkan niat mereka untuk menggunakan hak pilihnya.

2. Faktor Penghambat

d. Minimnya Sosialisasi politik

Sosialisasi atau edukasi seputar pilkada dilakukan tidak tepat sasaran. Penyelenggara yang melakukan edukasi politik dan pemberian informasi tentang politik kurang efektif dalam memberikan sosialisasi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat penyandang disabilitas tidak begitu tertarik dalam hal kegiatan politik dan hanya terlibat dalam hal pemberian suara saja.

e. Aspek psikologis

Aspek psikologi merupakan hal yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dan tingkah laku seseorang. Dalam kaitan hal ini secara khusus berkenaan dengan aspek psikologi yang dialami pemilih disabilitas menjadi salah satu penghambat angka partisipasi dalam pemilu. Pemilih disabilitas di Kelurahan Leneng yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada di antaranya

karena tumbuh rasa kurang percaya diri, rendah diri sehingga tidak ada keberanian untuk melangkah ke Tempat pemungutan Suara. Ketidakpercayaan diri yang disandang oleh pemilih disabilitas di Kelurahan Leneng dipicu oleh adanya anggapan buruk tentang disabilitas.

f. Fasilitas dan Aksesibilitas

Yang menjadi faktor penghambat bagi penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan politik untuk hal ini proses pemberian hak suara mereka di TPS. Penyelenggara sering melupakan atau tidak menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mereka dianggap sebagai kelompok minoritas yang tidak begitu diperhatikan fasilitas pendukungnya serta akses ketempat pemungutan suara yang jauh dari tempat tinggal mereka merupakan faktor penghambat bagi penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan politik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Tinggi dan rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemilih itu sendiri yang dapat mempengaruhi keikutsertaannya dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak terutama sekali dalam proses pemberian suara. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih yang berasal dari luar diri pemilih disabilitas itu sendiri.

Meskipun secara yuridis hak bagi penyandang disabilitas untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan politik sudah memiliki landasan hukum yang kuat, namun dilain sisi masih terdapat begitu banyak kendala dalam pengimplementasiannya, kendala tersebut bisa berupa kendala structural dan cultural. Kendala yang berupa structural sendiri bisa terjadi karena tingkat pemahaman yang belum merata diantara penyelenggara pemilu dengan penyandang disabilitas yang tentunya tidak bersifat disengaja dan sering dilakukan oleh oknum, selain itu juga disebabkan oleh masih adanya kebijakan-kebijakan yang masih bersifat diskriminatif. Sedangkan kendala cultural yang sering di hadapi oleh penyandang disabilitas yang disebut juga kultur, budaya, persepsi dan paradigma baik oleh masyarakat maupun penyandang disabilitas sendiri dalam menyikapi kondisi kedisabilitasan dikaitkan dengan perannya dalam politik dan pembangunan bangsa.

Beberapa kasus yang begitu sering muncul sebagai wujud dari kendala structural dan cultural yang sering di alami oleh penyandang disabilitas:

1. Masih sulitnya penyandang disabilitas untuk bisa mendaftar sebagai bagian dari penyelenggara pemilu dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa dikarenakan persyaratan pendidikan yang diminta terlalu tinggi, sedangkan pada umumnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas cenderung rendah

2. Kekurangpahaman para petugas TPS dalam menyikapi calon pemilih disabilitas yang hadir di TPS dan minimnya sarana prasarana pendukung untuk mewujudkan TPS yang akses bagi penyandang disabilitas.
3. Kultur sosial masyarakat yang kurang inklusif dan cenderung sulit menerima perbedaan membuat penyandang disabilitas merasa tidak percaya diri dan merasa dijadikan sebagai pusat perhatian pada saat proses pemberian hak suara di TPS.

Untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam pilkada Lombok tengah perlu dilakukan beberapa strategi, di antaranya melakukan sosialisasi khusus bagi pemilih disabilitas, meningkatkan pendidikan politik pemilih disabilitas, peningkatan layanan petugas KPPS khusus disabilitas, peningkatan sarana prasarana khusus pemilih disabilitas, dan dana alokasi khusus disabilitas. Dengan model penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pilkada diharapkan tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas meningkat sesuai dengan harapan penyelenggara pemilu dalam konteks demokrasi Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar nantinya partisipasi politik penyandang disabilitas lebih antusias dan meningkat lagi, untuk itu dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Lombok Tengah seharusnya terus melakukan sosialisasi secara maksimal dan menyeluruh kepada para penyandang disabilitas. Bukan hanya untuk penyandang disabilitas tuna netra, dan daksa. Penyandang disabilitas lainnya juga memerlukan pemerataan sosialisasi agar nantinya partisipasi politik penyandang disabilitas lebih meningkat.
2. KPU Kabupaten Lombok Tengah diharapkan melakukan pendataan kepada seluruh penyandang disabilitas, agar segala bentuk kebutuhan pemilih penyandang disabilitas bisa terpenuhi pada saat pemilihan.

3. Penyandang disabilitas seharusnya lebih bisa untuk meningkatkan kesadaran politiknya.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, *Javaners Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*,
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 47.
- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1984. "Budaya Politik Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi Di Lima Negara". Bina Aksara
- Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: SIC, 1998), Hlm. 128.
- Asep Ridwan dalam Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 4, no 1, 2004 "Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004 di Indonesia". Jakarta 2004.
- Bagong Suyanto, "*Metode Penelitian Sosial*", (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005) Hlm. 166.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dean Jaros, dkk, *Political behavior: Choice and perspectives*. (New York: St. Martin's Press, 1974), Hlm. 111-146.
- Dirga Ardina, dkk, *transaksi politik warga* (Depok: Cakra Wikara Indonesia, 2018), 4.
- Fauzi, Mohamad Rizki. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Tasikmalaya)*. Diss. FKIP Unpas, 2017.
- Fred I. Greenstein, *Kepribadian dan Politik*, (Chicago: Perusahaan Penerbitan Markham 1969), Hlm. 184
- Hermanto, Tri. "*Pengaruh tingkat pendidikan dan pekerjaan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum* (Studi korelasi di perumahan Joho Baru kabupaten Sukoharjo)." (2009).
- Hermawati, Putri. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Bogor pada*

Pemilihan Presiden Tahun 2019. Diss. Universitas Jenderal Soedirman, 2020.

Ibrahim, “*Metodologi penelitian kualitatif*”, (Alfabeta, Bandung, 2018), Hlm, 88..

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cetakan keempat 2016).hlm 80

Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hlm. 28



Perpustakaan UIN Mataram

- Lexi j, “*Metodologi penelitian*”, Hlm, 217.
- Maria Desti Rita, ”*Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam sosioalisasi politik Pemilihan umum kepala daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung pada tahun 2016*”
- Mas’oed, Mohtar, dan Mac Andrew Colin, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011) Hlm. 57-58.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Cet-IX, (Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2008), Hlm. 136.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 2008), Hlm. 367.
- Murti Sumarni, Salamah Wahyuni, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2006), Hlm. 85.
- Nabela Pusparani, ‘*Perlindungan hukum Terhadap Hak politik penyandang Disabilitas di Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011*’
- Oli, Rina Rahman. “*pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dikelurahan Tatura utara Kecamatan Palu selatan pada pilkada kota palu tahun 2015*”. EDU CIVIC 6.01 (2018).
- Patelima Hamid, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Centakan Kedua, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 3.
- Rachmat Kriyantono, “*teknik praktis riset komunikasi*”, (Jakarta, Kencana, 2006), Hlm, 196
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm.52.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1992), Hlm. 118
- Saebani, “*Metodelogi Penelitian*”, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), Hlm. 93.
- Samuel P. Hutington & Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm. 16
- Sarah Sausan H., ‘*Pemenuhan Hakhak Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kota Medan*’.

- Sari Aprita Maya Cut, Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2009, Medan, 2011.
- Sudarto. 1995. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 62
- Sudijono Sastroatmodjo, Prilaku Politik (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995).
- Sugiarto, Liani. "*Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan.*" (2016).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2018), hlm 8.
- Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, kualitatif dan R&D*", (Bandung, Alfabeta, 2006), Hlm. 193.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi reserch jilid II*, t.t., 74.
- Vulnerable Groups Eko Riyadi, *Kajian Dan Mekanisme Perlindungan* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012).
- Yulin Citriadin, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", (Mataram, Kalangan Sendiri, 2007), Hlm. 65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
 Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>

M A T A R A M

kode pos. 83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 892 / IV / R / BKBPND / 2022

1. **Dasar** :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dari Dekan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
 Nomor : 55/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/04/2022
 Tanggal : 7 April 2022
 Perihal : Izin Penelitian
2. **Menimbang** :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : MUH. HAERUL HUSNI
 Alamat : Lingkungan Tebero RT/RW 006 / 000 Kel/Desa. Leneng Kec. Praya Kab. Lombok Tengah No Identitas 52020119103990002 No Tlpn 087863205628
 Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam
 Bidang/Judul : ANALISIS PARTISIPASI POLITIK TERHADAP PILKADA LOMBOK TENGAH DI KELURAHAN LENENG KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 Lokasi : Kel. Leneng Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
 Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
 Lamanya : April - Mei 2022
 Status Penelitian : Baru
3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti** :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - d. **Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 11 April 2022

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
 KEPALA BIDANG WASNAS DAN PK



RIZAL FEBRIANDY UDJUJEDA, S.Sos
 NIP. 19730209 199402 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi NTB di Mataram;
2. Bupati Lombok Tengah Cq. Ka. Kesbangpol Kab. Lombok Tengah di Tempat;
3. Camat Praya Kab. Lombok Tengah di Tempat;
4. Lurah Leneng Kec. Praya Kab. Lombok Tengah di Tempat;



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA
KELURAHAN LENENG
 Jln. Gajah Mada No. 63 Leneng Praya Telp. 085303700723 Kode Pos 83515

SURAT IJIN PENELITIAN
 Nomor : *725/145/V-LNG/2022*

Sehubungan dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Nomor : 070 /592 /IV /R / BKBPDN / 2022 Tanggal 07 April 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka Lurah Leneng dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini :

N a m a : MUH. HAERUL HUSNI
NIM : 170603009
Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Benar telah mengadakan penelitian di Wilayah Kelurahan Leneng pada tanggal 01 April 2022 s/d 30 April 2022 guna melengkapi pada penyusunan Skripsi yang berjudul **ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DISABILITAS DALAM PILKADA LOMBOK TENGAH DI KELURAHAN LENENG KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Leneng, 30 Mei 2022
LURAH LENENG,

UNIVERSITAS ISLAM
M A T A R A M

[Signature]
H.MUHDIN,S.Sos
NIP.196612311986031087

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :1620/ Un.12/Perpustakaan/05/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh Haerul Husni
Nim : 170603009
Jurusan : PPI
Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similitar 22 % skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 30 Mei 2022

Kepala UPT Perpustakaan



Nuraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

Mataram – Nusa Tenggara Barat

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
NO. 923/M.03.02/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menerangkan
bahwa :

NAMA : MUH. HAERUL HUSNI
NIM : 170603009
FAK/JUR : FUSA/PPI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini
dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya
di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Surat keterangan ini
diberikan untuk keperluan daftar ujian skripsi.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 30 Mei 2022
An. Kepala Perpustakaan,



[Signature]
SUAEB, S. Adm.
NIP.196812312003121004





aan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**